

3 Anggota Teroris KKB Pimpinan Lekagak Telenggen Menyerahkan Diri

JAKARTA (IM) - Tiga teroris kelompok kriminal bersenjata (KKB) Organisasi Papua Merdeka (OPM) berinisial YAW (34), MM (17) dan OM (41) menyerahkan diri kepada aparat TNI Satgas Yonif 715/MtI saat melaksanakan patroli keamanan di Kampung Tanah Merah, Sabtu 15 Mei 2021. Ketiganya merupakan kelompok teroris Lekagak Telenggen.

Kapen Kogabwilhan III Kolonel Czi IGN Suriastawa membenarkan penyerahan diri ketiga teroris tersebut.

"Benar, tiga orang yang menyerahkan diri itu merupakan anggota kelompok teroris Lekagak Telenggen," ucap Suriastawa, saat dikonfirmasi pada Minggu (16/5) siang melalui telepon.

Berdasarkan pengakuan dari ketiga teroris yang menyerahkan diri ini, mereka

memiliki tugas yang berbeda-beda. YAW yang juga terlibat perang di Tembaga-pura tahun 2017-2019, bertugas sebagai pemantau aparat keamanan yang akan masuk ke Kampung Tigilobak. MM sebagai pencari logistik dan dana dari masyarakat, sedangkan OM sebagai pendamping saat YAW dan MM melaksanakan tugasnya.

Selain menyerahkan diri, ketiganya juga menyerahkan senjata berupa senapan angin, golok, anak panah, amunisi SS2 dan sofgun, beberapa dokumen dan perlengkapan lainnya, seperti ransel, HP, dan lain-lain.

"Saat ini, ketiga teroris dan barang bukti sudah diserahkan kepada Satgas Nembangawi Polri untuk pemeriksaan dan proses lebih lanjut," jelas Suriastawa mengakhiri sambungan teleponnya. ● han

Anggota DPR Dukung Pemerintah Hentikan Agresi Israel ke Palestina

JAKARTA (IM) - Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Christina Aryani, mendukung upaya pemerintah yang tengah berupaya menghentikan agresi Israel ke Palestina. Christina mengapresiasi langkah pemerintah Indonesia yang mengupayakan penyelesaian melalui berbagai lini, termasuk melalui Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestines (CEIRPP).

Kemudian, upaya tersebut juga ditempuh melalui Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) dan juga Gerakan Non Blok.

"Dorongan upaya penyelesaian ini perlu terus dilakukan dengan maksimal guna mencegah jatuhnya lebih banyak korban di kedua belah pihak," tutur Christina lewat keterangan tertulis, Minggu (16/5).

Ia pun menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Palestina dengan Israel. Hingga saat ini serangan yang dilancarkan oleh Israel yang kemudian direspons oleh Palestina menimbulkan

banyak korban dari masyarakat sipil.

"Kami sangat menyayangkan meningkatnya eskalasi konflik antara Israel dan Palestina. Menjadi teramat penting bagi kedua belah pihak untuk menahan diri guna mencegah eskalasi konflik meningkat menjadi perang terbuka," ujar Christina.

Dia pun menyinggung situasi politik internal Israel. Saat ini Israel juga tengah mengalami permasalahan internal, dimana usai pemilu pada Maret, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu gagal membentuk koalisi pemerintahan. Sementara itu, Presiden Reuven Rivlin telah menunjuk legislator Yair Lapid, ketua Partai Yesh Atid (Future Party) untuk membentuk koalisi pemerintahan dalam rentang waktu kurang dari 28 hari. Ini menjadi tantangan tersendiri akibat fragmentasi partai politik di parlemen. Kegagalan membentuk koalisi pemerintahan akan memaksa Israel kembali melaksanakan pemilu legislatif kelima sejak tahun 2019.

● han

2 Polhukam

IDN/ANTARA



BANTUAN MOTOR LISTRIK UNTUK DIFABEL

Menteri Sosial Tri Rismaharini (tengah) berbincang bersama penyandang disabilitas Gading Oga Saputra saat kunjungan di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Minggu (16/5). Kementerian Sosial memberikan bantuan berupa sepeda motor listrik roda tiga dan modal usaha dengan total Rp19,5 juta kepada Gading Oga Saputra warga difabel yang bekerja sebagai pedagang makanan ringan untuk memudahkan aktivitas sehari-hari.

Ada Pertentangan Hukum dalam TWK Terkait Alih Status Pegawai KPK Jadi ASN

TWK pegawai KPK dianggap pertentangan hukum. Sebab TWK tak diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK maupun PP Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK.

JAKARTA (IM) - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Sigit Riyanto, meminta Surat Keputusan (SK) pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait pegawai yang tidak memenuhi syarat dalam tes wawasan kebangsaan (TWK) dibatalkan.

Adapun TWK merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam SK pimpinan KPK disebut, sebanyak 75 pegawai yang tak memenuhi syarat diminta untuk menyerahkan tugas dan tanggung jawab ke-

pada atasannya. Sigit menilai, pelaksanaan TWK bertentangan dengan makna alih status pegawai KPK.

"Ini tentu bertolak belakang dengan pemaknaan alih status, melainkan sudah masuk pada ranah pemberhentian oleh pimpinan KPK," kata Sigit, dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan, Minggu (16/5).

"Sebab, 75 pegawai KPK yang disebutkan TMS (tidak memenuhi syarat) tidak dapat lagi bekerja seperti sedia kala," ucapnya.

Menurutnya, secara garis besar terdapat dua isu penting

dalam TWK pegawai KPK, yakni pertentangan hukum dan permasalahan etika publik.

Misalnya, TWK tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang UU KPK maupun Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 sebagai syarat alih status kepegawaian KPK.

Bahkan, Mahkamah Konstitusi telah mengesahkan dalam putusan uji materi UU KPK, bahwa proses alih status kepegawaian tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK. Namun, menurut Sigit, aturan itu diabaikan oleh Pimpinan KPK dengan tetap memasukkan konsep TWK ke dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021.

"Tidak hanya itu, substansi TWK juga memunculkan kecurigaan kami, khususnya dalam konteks pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pegawai KPK saat menjalani

wawancara," kata Sigit.

"Secara umum menurut pandangan kami apa yang ditanyakan mengandung nuansa irasional dan tidak relevan dengan isu pemberantasan korupsi," ucapnya.

Oleh sebab itu, Sigit berpendapat TWK tidak tepat jika dijadikan syarat untuk mengangkat pegawai KPK menjadi ASN. Seharusnya proses alih status ini dapat berjalan langsung, tanpa ada seleksi tertentu sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan.

Apalagi, kata Sigit, sejumlah pegawai KPK yang diberhentikan telah memiliki rekam jejak panjang dalam upaya penindakan maupun pencegahan korupsi. Misalnya, dalam hal masa kerja, sejumlah pegawai yang diberhentikan bahkan tercatat sudah bergabung pada 2003 atau sejak lembaga anti-rasuah itu berdiri.

"Sederhananya, jika wawasan kebangsaan mereka diragukan mestinya dengan sendirinya akan tercermin di dalam kinerjanya selama ini, misalnya melakukan pelanggaran etik atau tidak taat terhadap perintah UU," kata Sigit.

"Jadi, secara kasat mata terlihat bahwa ketidaklulusan mereka tidak sesuai dengan kinerja yang sudah diberikan

selama ini," ujarnya.

Pada konteks lain, Sigit mengatakan, terdapat permasalahan yang tidak kalah serius dalam proses alih status kepegawaian KPK. Sebab, dari sekian banyak pegawai yang diberhentikan, terdapat para penyelidik dan penyidik. Hal ini tentu akan berimplikasi pada perkara yang sedang mereka tangani, mulai dari korupsi suap bansos di Kementerian Sosial, suap ekspor benih lobster, pengadaan KTP elektronik, dan suap mantan sekretaris Mahkamah Agung.

"Kami menilai bukan tidak mungkin pengusutan perkara-perkara tersebut akan melambat, dan hal ini tentu merugikan rakyat selaku korban praktik korupsi dan pemegang kedaulatan tertinggi di republik ini," kata Sigit.

"Semestinya setiap pihak sadar bahwa citra pemberantasan korupsi Indonesia kian menurun," ucapnya.

Sebab, hal itu terbukti dari temuan Transparency International yang memperlihatkan kemerosotan peringkat maupun poin Indonesia Indeks Persepsi Korupsi (IPK) pada 2020. Sigit menilai, jika dikaitkan dengan kondisi KPK terkini, besar kemungkinan IPK Indonesia akan kembali turun pada tahun selanjutnya. ● han



IDN/ANTARA

PENYEKATAN ARUS BALIK LEBARAN DI PONTIANAK

Sejumlah warga menunggu di belakang bus saat terjaring penyekatan arus balik Lebaran di Terminal Batu Layang, Pontianak, Kalimantan Barat, Minggu (16/5). Dalam giat yang dilakukan aparat gabungan dari TNI/Polri bersama Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar tersebut dilakukan tes GeNose C19 dan rapid antigen secara acak terhadap pemudik maupun warga pendatang yang masuk ke Kota Pontianak guna meminimalisir penyebaran COVID-19.

3 Orang Pengibar Bendera RMS Ditetapkan Jadi Tersangka

AMBON (IM) - Polisi menetapkan tiga orang sebagai tersangka pelaku pengibaran bendera separatis Republik Maluku Selatan (RMS) di Desa Ulah, Kecamatan Saparua, Kabupaten Maluku Tengah. Satu di antaranya merupakan residivis dalam perkara yang sama. "Satu pelaku berinisial FP merupakan pemain lama atau residivis, sedangkan dua rekannya berinisial AP dan ML merupakan pelaku baru," kata Kasubag Humas Polresta Pulau Ambon dan Pulau-Pulau Lease Ipd I. Leatemia di Ambon, Minggu (16/5).

Ketiga pelaku ditahan Mapolresta Ambon. Polisi menjerat mereka melanggar Pasal 106 KUHPidana dan atau pasal 110 KUHPidana dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara.

Menurut dia, para pelaku ini melakukan aksi pengibaran bendera separatis pada 15 Mei 2021 di Desa Ulah, Kecamatan Saparua.

Perbuatan tersebut dilakukan bertepatan dengan perayaan ulang tahun Pahlawan Nasional Thomas Matullessy alias Kapitan Pattimura tahun 2021.

"Awalnya polisi menahan dua tersangka dan setelah dilakukan pengembangan penyidikan perkara lalu diketahui ada satu pelaku lagi sehingga polisi langsung melakukan penangkapan," jelas Leatemia.

Polisi juga telah menyita dua lembar bendera asing yang dikibarkan pelaku di atas pohon mangga dekat sebuah rumah warga bernama A. Manuputty.

Bhabin kamtibmas setempat melaporkan kalau bendera asing ini dikibarkan pada Sabtu (15/5) dinihari sekitar pukul 02.30 WIT dan akhirnya diturunkan setengah jam kemudian.

Pagi harinya Bhabin kamtibmas juga melaporkan ada dua pengibaran bendera serupa di desa tersebut, tepatnya di depan rumah seorang warga berinisial AP serta depan rumah Sekretaris Negeri Ulah berinisial WT dan pelaku pengibaran diketahui sehingga polisi menangkap mereka. ● mei

KPK Pastikan Pembebasan 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Tak akan Ganggu Kinerja

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan pembebasan terhadap 75 pegawai yang tidak memenuhi syarat (TMS) dalam asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) tidak mengganggu kinerja KPK.

Seperti diketahui, TWK merupakan asesmen dalam proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

"Sejauh ini, khusus pekerjaan pada ke deputian penindakan masih berjalan. Demikian juga program dan kegiatan pada ke deputian yang lain," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Sabtu (15/5).

Ali menyebut, kerja-kerja pegawai KPK tidak ada yang dilakukan individual, namun dalam bentuk satuan tim. Oleh karena itu, dibebastugaskannya 75 pegawai yang TMS tersebut tidak akan mengganggu kinerja penindakan di KPK.

"Kerja-kerja di KPK di seluruh ke deputian dilakukan tidak ada yang individual, namun secara tim dalam bentuk satgas yang dipimpin ketua tim atau kasatgas dengan kontrol dari direktur masing-masing direktorat sebagai atasan langsungnya," kata Ali.

Ali juga menyatakan 75

pegawai TMS yang tersebar di hampir semua direktorat itu bukan dinyatakan nonaktif karena semua hak dan tanggung jawab kepegawaian masih tetap berlaku.

"Menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya maksudnya adalah sekiranya atas polemik saat ini ada pekerjaan yang berpotensi menimbulkan implikasi hukum agar diserahkan lebih dahulu kepada atasan langsungnya sampai ada keputusan lebih lanjut," ucap Ali.

Selain itu, Ali juga menegaskan sampai saat ini belum ada keputusan apapun mengenai 75 pegawai tersebut. Sebab, KPK masih berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait keputusan lebih lanjut.

"Bagi KPK, seluruh pegawai yang berjumlah sekitar 1.586 orang adalah orang-orang yang penuh integritas dan itu aset bagi lembaga dalam iklim pemberantasan korupsi," kata Ali.

"Untuk itu, tentu KPK akan mengambil keputusan yang terbaik sesuai aturan yang berlaku atas hasil TWK dari BKN tersebut," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Firlil Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) Pegawai yang Tidak Memenuhi Syarat Dalam Rangka Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Ada empat poin yang tercantum dalam SK yang ditandatangani Firlil dan ditetapkan di Jakarta pada 7 Mei 2021 tersebut. Pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini, tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasannya langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran dalam keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. ● han



IDN/ANTARA

ARUS BALIK PEMUDIK KE JABODETABEK

Foto udara sejumlah kendaraan antri saat melintasi pos pemeriksaan kesehatan arus balik di Tol Jakarta-Cikampek KM 34 B di Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Minggu (16/5). Kementerian Perhubungan memprediksi arus balik pemudik untuk kembali ke Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) pada 16 sampai dengan 20 Mei 2021.

Dua Anggota KKB Papua Tewas Saat Baku Tembak dengan TNI-Polri

PAPUA (IM) - Kasatga Humas Nembangawi, Kombes Pol Iqbal Alqudusy membenarkan terjadi kembali kontak senjata antara pihaknya dengan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Kampung Mayuberi Ilaga, Papua, Minggu (16/5) sekitar pukul 03.19 Wita.

Iqbal mengatakan, dua anggota teroris KKB Papua itu tewas dalam baku tembak dengan aparat. Satgas Nembangawi juga menyita sebuah senjata Moser kaliber 7,62 mm dan sebuah HT. Baku tembak sempat terjadi di Jembatan Mayuberi, Ilaga Papua.

"2 Teroris kelompok Lekagak Telenggen Tewas, Ditemukan 1 Senjata Moser Kaliber 7,62 dan 1 buah HT," kata Iqbal.

Iqbal mengatakan, Satgas Nembangawi s melakukan penyisiran setelah terjadi baku tembak.

"Hari ini Satgas Gakkum Nembangawi akan melakukan olah TKP di Mayuberi," imbuhnya.

Pihaknya menegaskan akan terus mengejar dan melakukan penegakan hukum terhadap kelompok teroris yang saat ini berada pada zona Mini (Mimika, Intanjaya, Nduga dan Ilaga/puncak).

"Situasi di kota Ilaga saat ini sangat kondusif. Aktifitas warga seperti biasa. Pasar ramai penjual dan pembeli," pungkasnya.

Operasi Kemanusiaan

Satgas Nembangawi menyatakan bahwa penegakkan hukum kepada teroris KKB di Papua dilakukan secara tegas dan terukur. Langkah tersebut juga dilakukan dengan operasi kemanusiaan melalui Binmas Noken Polri.

Binmas Noken Polri hadir melalui berbagai kegiatan, di antaranya program Polisi Pi Ajar. Pada program ini polisi yang bertugas mengajarkan

kepada anak-anak tentang wawasan kebangsaan, membaca dan menghitung. Pola pembelajaran yang diberikan pun berbeda, yakni belajar sambil bermain.

Tak hanya itu, Binmas Noken Polri juga memberikan cara beternak dan berkebun yang baik kepada peternak maupun petani orang asli Papua. Pendampingan dan pemberian pupuk serta bibit diberikan pula.

Sementara pada penegakan hukum kepada kelompok teroris yang tersebar di wilayah Papua terus dilakukan secara tegas dan terukur, agar masyarakat sipil tidak menjadi korban.

Iqbal mengatakan, dalam operasi penegakan hukum kelompok teroris, personel TNI-Polri telah melakukan pemetaan.

Pemetaan dilakukan agar dapat membedakan mana bagian dari kelompok teroris, dan mana masyarakat sipil.

Tewasnya Wendis Enimbo, ajudan pribadi Lesmin Pintu Angin sebagai komandan pasukan pimpinan teroris Lekagak Telenggen, dalam kontak senjata dengan pasukan TNI-Polri di Kampung Wuloni, Distrik Ilaga, Kabupatrn Puncak pada Kamis 13 Mei 2021, membuktikan bahwa dalam melakukan penegakan hukum dilakukan secara tegas dan terukur.

"Penegakan hukum kelompok teroris Papua tegas dan terukur," kata Iqbal.

Operasi Nembangawi dibentuk dengan pertimbangan adanya gangguan kamtibmas yang dilakukan kelompok teroris Papua, hingga mengganggu kehidupan masyarakat di beberapa wilayah Papua melalui aksi teror bersenjata.

Kombes Iqbal menegaskan, TNI-Polri akan selalu hadir di Papua untuk melakukan penegakan hukum kepada kelompok teroris. ● han